



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 22 JULI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

WABUP SIDOARJO GARCEP TINJAU SD NEGERI KUPANG 3 DAN SD NEGERI KUPANG 4 DI DAERAH TERPENCIL

Pastikan Perbaikan Sekolah dan Percepat Program MBG

Sidoarjo, Pojok Kiri.

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.A.P., garcep meninjau langsung kondisi SD Negeri Kupang 3 dan SD Negeri Kupang 4 di Kecamatan Jabon, Senin (20/7/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi sarana pendidikan di wilayah pesisir dan terpencil sekaligus mempercepat penanganan kerusakan bangunan sekolah dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di SDN Kupang 3 yang berjumlah siswa tujuh puluh orang, Mimik menemukan sejumlah ruang kelas yang rusak. Kondisi bangunan dinilai masih belum layak karena atap bocor, dinding retak dan dinding pembatas antar kelas berlubang serta beberapa bagian memerlukan rehabilitasi menyeluruh.

"Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kalau memang harus direhabilitasi total, segera direncanakan agar anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman," tegasnya.

Peninjauan dilanjutkan ke SDN Kupang 4. Sekolah yang berdiri sejak 1987 itu masih menggunakan beberapa ruang kelas yang kondisinya memprihatinkan. Menurut Mimik, empat ruang kelas menjadi prioritas rehabilitasi dengan menggunakan material yang sesuai karakteristik wilayah pesisir agar lebih tahan terhadap korosi akibat kadar garam yang tinggi.

"Walaupun siswanya hanya dua belas orang, mereka tetap memiliki hak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Sekolah di daerah terpencil seperti ini harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.



Mimik juga mengapresiasi dedikasi para guru yang tetap mengajar meski harus menempuh perjalanan jauh dan menghadapi berbagai keterbatasan.

"Terima kasih atas pengabdian bapak dan ibu guru. Meskipun muridnya sedikit, tetap semangat mendidik mereka karena setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang terbaik," katanya.

Selain itu, Mimik memastikan Program MBG segera menjangkau SDN Kupang 3, SDN Kupang 4, dan TK di kawasan tersebut. Selama ini para siswa belum menerima manfaat program karena pembangunan dapur pelayanan belum selesai dan lokasi distribusi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih cukup jauh.

"Sudah kami koordinasikan. Insya Allah akhir bulan ini MBG mulai disalurkan sehingga anak-anak di wilayah ini dapat segera merasakan

manfaatnya," ungkapnya.

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Netty Lastingsih, memastikan hasil peninjauan di SDN Kupang 3 dan SDN Kupang 4 akan segera ditindaklanjuti melalui kajian teknis. Menurutnya, rehabilitasi bangunan akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah pesisir agar lebih tahan terhadap kadar garam yang tinggi.

"Perbaikan akan menggunakan material yang sesuai dengan kondisi lingkungan pesisir sehingga bangunan lebih awet dan pemanfaatan anggaran menjadi lebih efektif. Kami juga memastikan Tunjangan Bantuan Pendidikan (TB) tahap I dan II bagi siswa yang memenuhi syarat dapat segera direalisasikan tahun ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni

Chudlori mendorong peningkatan kesejahteraan guru di daerah terpencil melalui usulan tambahan insentif dan tunjangan transportasi pada APBD 2027.

"Guru di wilayah terpencil masih menanggung sendiri biaya transportasi. Karena itu kami mengusulkan adanya tunjangan khusus yang didukung regulasi daerah. Selain itu, wilayah Kupang Kecamatan Jabon juga harus menjadi prioritas Program Makan Bergizi Gratis serta mendapat perhatian dalam perbaikan akses jalan menuju sekolah," tegas Dhamroni.

Sebagai bentuk kepedulian, Mimik turut menyerahkan bantuan kepada para guru dan siswa serta menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil. (Khol/Dy)



PRIHATIN: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch Dhamroni Chudlori (kanan) meninjau kondisi SDN Kupang 4 Jabon yang berada di wilayah terpencil Kecamatan Jabon.

Komisi D Usulkan Guru SDN Kupang 4 Jabon Terima Insentif Tiga Kali Lipat

JABON-Dedikasi para guru yang tetap mengajar di tengah keterbatasan akses menuju SDN Kupang 4 Jabon, Kecamatan Jabon, mendapat perhatian Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch Dhamroni Chudlori. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memberikan insentif khusus serta tunjangan transportasi bagi guru yang bertugas di sekolah terpencil tersebut.

Politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Pak Dham itu menilai perjuangan para guru di SDN Kupang 4 Jabon membutuhkan pengorbanan yang jauh lebih besar dibanding guru yang bertugas

• Ke Halaman 10

ECERAN: Rp 5.000

MUI Temukan 20 Titik Penjual Miras Terselubung, Pemkab Siapkan Penindakan

KOTA-Dugaan keberadaan sedikitnya 20 titik penjual minuman keras (miras) yang beroperasi secara terselubung di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Sejumlah tempat usaha bahkan diduga menyalahtugaskan izin usaha, seperti menggunakan izin perdagangan beras untuk aktivitas penjualan miras.

Temuan tersebut disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo dalam pertemuan bersama Pemkab Sidoarjo. Menindaklanjuti laporan itu, pemerintah memastikan akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan, Pemkab berkomitmen menindaklanjuti hasil pembahasan bersama MUI dan instansi terkait. Saat ini, beberapa izin operasional tempat usaha yang diduga melanggar aturan telah diproses



untuk dicabut dan tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

"Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti hasil pembahasan bersama MUI dan instansi terkait. Beberapa izin operasional sudah diproses untuk ditutup, tinggal melengkapi administrasi," ujar Mimik, Selasa (21/7).

Ia menjelaskan, Satpol PP Sidoarjo saat ini juga tengah merampungkan

• Ke Halaman 10

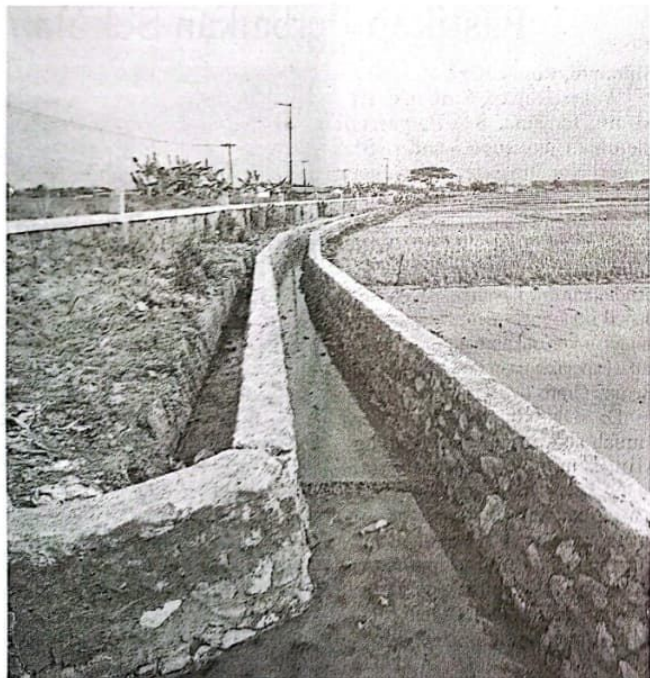
Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti hasil pembahasan bersama MUI dan instansi terkait. Beberapa izin operasional sudah diproses untuk ditutup, tinggal melengkapi administrasi."

Mimik Idayana, Wakil Bupati Sidoarjo



CARI SOLUSI: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menggelar pertemuan dengan MUI Kabupaten Sidoarjo untuk membahas dugaan peredaran minuman keras (miras) secara terselubung.

HADIRNYA P3-TGAI BERIKAN SOLUSI KETERBATASAN AKSES AIR BAGI HIPPA JAYA MANDIRI



Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Di tahun 2025 ini Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Jaya Mandiri Desa Plumbon Kecamatan Porong merasakan Manfaat dari program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), karena pembangunan saluran Irigasi tersier tersebut berupa perbaikan dan peningkatan saluran irigasi yang berujung pada lancar dan efisiennya distribusi air ke sawah, sehingga bisa meningkatkan luas tanam, produktivitas hasil panen, dan kesejahteraan bagi petani.

Selain memberikan Manfaat Langsung bagi Petani, Program Percepatan Peningkatan Tata-guna Air Irigasi ini bertujuan untuk Peningkatan Luas Tanam dan Hasil Panen, karena Dengan pasokan air yang lancar dan terjamin, petani dapat meningkatkan luas areal tanam dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas hasil panen.

Dalam keteranganya Ketua

HIPPA Jaya Mandiri Menjelaskan” P3 - TGAI dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif di wilayah pedesaan” terangnya Selasa (21/7)

“Saat ini irigasi pertanian di Desa Kami sebagian masih berbentuk tanah dan belum Ditingkatkan sehingga kualitas jaringan irigasi atau tangkapan air kurang efisien, sehingga mengurangi produktivitas pertanian, oleh karena itu Dengan hadirnya P3 - TGAI dari Pemerintah Pusat melalui pemerintah Desa ingin melibatkan masyarakat petani secara langsung sebagai penerima manfaat agar berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier” Pungkasnya. (Nang)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Pastikan SDN Kupang 3 dan 4 Jabon Direhab Tahun Ini

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan SD Negeri Kupang 3 dan SD Negeri Kupang 4 Desa Kupang Kecamatan Jabon menjadi prioritas rehabilitasi tahun ini. Kondisi bangunan kedua sekolah dinilai memprihatinkan sehingga membutuhkan penanganan segera agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan aman dan nyaman.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan, hasil inspeksi menunjukkan kerusakan cukup berat, terutama di SDN Kupang 4 yang membutuhkan rehabilitasi total pada empat ruang kelas. Sementara di SDN Kupang 3, kerusakan banyak ditemukan pada bagian atap, dinding, hingga

pintu ruang kelas. "SD Kupang 3 dan SD Kupang 4 menjadi prioritas perbaikan. Untuk SD Kupang 4, empat ruang kelas harus direhabilitasi total. Karena berada di kawasan dengan kondisi tanah dan air yang asin, pembangunan nantinya harus menggunakan material yang tahan terhadap korosi agar bangunan lebih awet," kata Mimik, Senin (20/7/2026).

Mimik menambahkan, sebagian bangunan SDN Kupang 4 yang telah diperbaiki pada 2024 masih dalam kondisi baik. Namun, rehabilitasi lanjutan tetap diperlukan agar seluruh ruang belajar memenuhi standar kelayakan.

Selain pembangunan fisik sekolah, Pemkab Sidoarjo juga memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera menyasar siswa di kedua sekolah tersebut. Selama ini para siswa belum



Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat mengunjungi SDN Kupang 3 dan 4 Sidoarjo.

menerima manfaat program karena pembangunan dapur pelayanan belum selesai dan lokasi distribusi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih cukup jauh. "Sudah kami koordinasikan. Insyaallah akhir bulan ini program MBG mulai disalur-

kan kepada siswa SD Kupang 3 dan SD Kupang 4," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Netty Lastiningsih mengatakan, rehabilitasi akan memperhatikan karakteristik lingkungan pesisir agar bangunan memiliki daya

tahan lebih baik. "Kami akan memastikan proses rehabilitasi menggunakan material yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang memiliki kadar garam tinggi. Dengan begitu, bangunan sekolah bisa bertahan lebih lama dan anggaran yang dikeluarkan menjadi lebih efektif," ujar Netty.

Netty juga menyampaikan bantuan pendidikan bagi siswa akan segera direalisasikan. Tunjangan Bantuan Pendidikan (TB) tahap I dan II dijadwalkan cair tahun ini dengan besaran Rp 100 ribu per bulan untuk setiap siswa yang memenuhi ketentuan.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mengusulkan peningkatan bantuan transportasi atau tunjangan guru yang bertugas di wilayah terpencil tersebut harus diprioritaskan diusulkan pada Anggaran Tahun 2027. Dinas Pendidikan harus several

melengkapi data pendukung dan melakukan kajian besaran kebutuhan riil di lapangan.

"Kami mengusulkan agar tunjangan kinerja atau insentif guru di daerah terpencil dapat ditingkatkan hingga tiga kali lipat dari besaran sebelumnya. Jika mengacu pada nominal lama sekitar Rp 500 ribu per bulan, usulan tersebut diharapkan bisa mencapai sekitar Rp 1,5 juta per bulan, dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah setelah melalui kajian Dinas Pendidikan," Kara Dhamroni.

Selain itu, Komisi D meluruskan informasi yang beredar terkait biaya transportasi guru. Berdasarkan hasil peninjauan, tidak ada bantuan sewa perahu bagi guru. Selama ini para guru masih menanggung sendiri biaya penyeberangan, perawatan kendaraan, hingga biaya perjalanan menuju sekolah. (md/rus)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

57 Murid PAUD hingga SMP Hidup dengan HIV

SIDOARJO - Sebanyak 522 anak dan remaja usia sekolah di Sidoarjo tercatat sebagai orang dengan HIV (ODHIV). Bahkan, data Yayasan Delta Crisis Center (DCC) menunjukkan, sebanyak 57 penderita masih sekolah di jenjang PAUD hingga SMP.

Direktur Program Yayasan DCC Ferry Efendi menjelaskan, dari 522 ODHIV usia sekolah, sebanyak 13 merupakan anak usia PAUD/TK, 44 anak usia SD hingga SMP sederajat, dan 465 lainnya berasal dari kelompok SMA sederajat hingga mahasiswa. Data tersebut merupakan akumulasi kasus yang dihimpun DCC hingga awal Juli 2026.

Menurut Ferry, penularan HIV pada anak dan remaja dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari penularan dari ibu ke anak, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, hingga hubungan seksual berisiko. "Masyarakat perlu memahami bahwa HIV tidak menular melalui kontak sosial sehari-hari," ujarnya kemarin (21/7).



Kami mendorong penguatan pendidikan kesehatan di sekolah untuk mencegah bertambahnya kasus."

Laksmie Herawati Yuantina
Kepala Dinkes Sidoarjo

Menanggapi data tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Laksmie Herawati Yuantina menuturkan, anak yang terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan terapi antiretroviral (ARV) dan dipantau secara berkala agar kualitas hidupnya tetap terjaga. Selain pengobatan, edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar juga menjadi bagian penting untuk mencegah stigma terhadap ODHIV. "Kami mendorong penguatan pendidikan kesehatan di sekolah untuk mencegah bertambahnya kasus," kata Laksmie. (ful/hen)

Jawa Pos

Warga Tak Bisa Terima Bansos, Komisi D Minta Dinsos Verifikasi Ulang



PENCEGAHAN: Sejumlah pelajar menjalani tes urine sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.

Siapkan 450 Alat Tes Urine untuk Cegah Penyalahgunaan Narkoba

■ BNNK Sasar 10 Sekolah

KOTA-Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo menyasar 10 sekolah jenjang SMP hingga SMA dalam program edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dibarengi dengan tes urine pada tahun ajaran 2026/2027.

Untuk mendukung program tersebut, BNNK Sidoarjo menyiapkan 450 alat tes urine. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif un-

tuk mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus meningkatkan kesadaran pelajar terhadap bahaya narkoba sejak dini.

Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Sidoarjo, Widya, mengatakan edukasi dan tes urine merupakan bagian dari strategi pencegahan agar generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, awal tahun ajaran menjadi momentum yang tepat untuk

memperkuat edukasi sekaligus pengawasan di lingkungan sekolah.

"Momentum awal tahun ajaran dinilai tepat untuk memperkuat pengawasan di lingkungan sekolah," kata Widya, Selasa (21/7).

Salah satu sekolah yang telah melaksanakan kegiatan tersebut adalah SMA Progresif Bumi Shalawat. Sebanyak 95 siswa mengikuti tes urine, dan seluruhnya dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba. (sur/vga)

KOTA-Sorang warga Kecamatan Sidoarjo mengadu ke Komisi D DPRD Sidoarjo lantaran tidak bisa memperoleh bantuan sosial (bansos). Meski mengaku telah bertahun-tahun menganggur dan terlilit utang, warga tersebut masih tercatat dalam desil 6 atau kategori mampu dalam basis data pemerintah.

Menindaklanjuti aduan itu, Komisi D DPRD Sidoarjo meminta Dinas Sosial (Dinsos) beruma pemerintah desa dan kecamatan melakukan verifikasi ulang agar data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Zuhlul Yussar, mengatakan persoalan tersebut terungkap dalam hearing yang dihadiri warga bersangkutan, Dinsos, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa, Selasa (21/7).

Menurutnya, warga tersebut datang untuk meminta bantuan karena sudah lama kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi. Namun, setelah dilakukan pengecekan, statusnya masih tercatat sebagai warga mampu.

"Beliau menginginkan bantuan sosial, tetapi setelah kami kroscek ternyata masih masuk desil 6 dan kepesertaan BPJS Kesehatannya masih kelas 1. Artinya, di sistem masih dikategorikan mampu," ujar Zuhlul.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, berdasarkan pengakuan warga,



Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Zuhlul Yussar

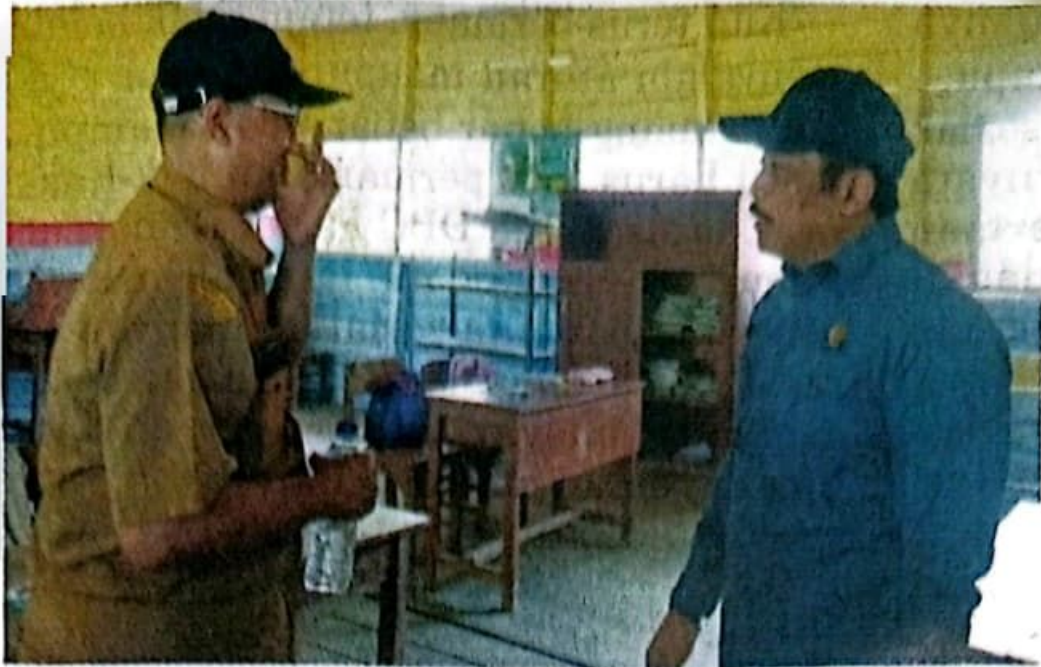
yang bersangkutan telah menganggur selama sekitar empat hingga enam tahun. Berbagai upaya dilakukan untuk bertahan hidup, termasuk membuka usaha nasi pecel. Namun usaha tersebut gagal hingga modal habis dan akhirnya terlilit utang.

Karena itu, Komisi D meminta Dinsos segera melakukan verifikasi ulang sesuai prosedur agar status ekonomi warga tersebut dapat diperbarui apabila memang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.

"Kami berharap ada verifikasi ulang dari Dinsos. Beliau nanti mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SK-TM) dari RT/RW yang dilegalisasi pemerintah desa dan kecamatan. Setelah itu Dinsos melakukan survei kembali terhadap kondisi rumah maupun pekerjaannya," jelasnya.

Zuhlul menegaskan, perubahan status data tidak dapat dilakukan secara instan. Seluruh proses harus melalui tahapan administrasi dan survei lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita terus berjuang, tetapi tidak boleh menyalahi aturan maupun regulasi. Kalau memang benar-benar tidak mampu, tentu harus kita perjuangkan hak-haknya," tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo itu. Ia menjelaskan, penerima bantuan sosial umumnya berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4, yakni masyarakat sangat miskin hingga rentan miskin. (dik/vga)



DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

PRIHATIN: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch Dhamroni Chudlori (kanan) meninjau kondisi SDN Kupang 4 Jabon yang berada di wilayah terpencil Kecamatan Jabon.

Komisi D Usulkan Guru SDN Kupang 4 Jabon Terima Insentif Tiga Kali Lipat

JABON-Dedikasi para guru yang tetap mengajar di tengah keterbatasan akses menuju SDN Kupang 4 Jabon, Kecamatan Jabon, mendapat perhatian Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch Dhamroni Chudlori. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memberikan insentif khusus serta tunjangan trans-

portasi bagi guru yang bertugas di sekolah terpencil tersebut.

Politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Pak Dham itu menilai perjuangan para guru di SDN Kupang 4 Jabon membutuhkan pengorbanan yang jauh lebih besar dibanding guru yang bertugas

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bengkel Karoseri Diduga Cemari Lingkungan

Respons Cepat Aduan Warga, DPRD Sidoarjo Gelar Sidak

Sidoarjo - HARIAN BANGSA Komisi A dan Komisi C DPRD Sidoarjo menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah bengkel karoseri di Desa Seketi Kecamatan Balongbendo, Selasa (14/7). Sidak wakil rakyat ini merespons pengaduan warga yang mengeluhkan bengkel itu yang diduga menimbulkan kebisingan mesin produksi dan pencemaran limbah cat.

Sidak komisi yang membidang hukum-pemerintahan dan membidangi pembangunan-lingkungan hidup ini digelar bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Balongbendo. Sidak juga untuk melakukan mediasi warga dengan pihak pengusaha. Mediasi digelar di Kantor Desa Seketi setelah rombongan wakil rakyat meninjau lokasi bengkel karoseri yang berada di lingkungan RT 01 RW 09 Desa Seketi. Mediasi tersebut dipimpin Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat. Hadir dalam mediasi ini, yakni Kepala Desa Seketi Toto Sugono,

Camat Balongbendo Ardi Anindita, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ridho Prasetyo dan Pdt Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan (DLHK) Iswadi Pribadi. Pertemuan mediasi ini juga diikuti perwakilan warga, termasuk Ketua RT 01 dan Ketua RW 08 Desa Seketi, serta pengusaha bengkel karoseri. Hasil mediasi, pengusaha yang memiliki bengkel karoseri itu, diberi tenggat waktu dua bulan untuk memenuhi tuntutan warga. Jika mengabaikan kesepakatan, maka izin usaha bengkel karoseri itu terancam dicabut. Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Muhammad Abud Asyrof menjelaskan, hasil sidak membuktikan keluhan masyarakat memang terjadi di lapangan. Aktivitas produksi dinilai telah melewati batas kewajaran dan mengganggu warga sekitar. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut, temuan di lapangan mengonfirmasi kebenaran dari laporan masyarakat. Suara bising dari aktivitas produksi itu bahkan melebihi jam kerja pada umumnya. "Jelas ini mengganggu waktu istirahat warga. Ditambah kekhawatiran soal



RESPONS ADUAN WARGA-Komisi A dan Komisi C DPRD Sidoarjo saat sidak ke lokasi bengkel karoseri di Desa Seketi Balongbendo, Selasa (14/7). Foto istimewa

dampak limbah cat," tandasnya. Untuk meredam konflik antara warga dan pihak pengusaha bengkel karoseri, DPRD Sidoarjo lalu memfasilitasi mediasi, mempertemukan pihak pengusaha, perwakilan warga, Pemdes Seketi dan instansi teknis terkait. Dari pertemuan mediasi itu, dicapai sejumlah kesepakatan yang wajib dijalankan pihak pengusaha. Diantaranya mengevaluasi jam operasional agar tidak mengganggu waktu istirahat warga, membangun tembok pembatas guna meredam kebisingan,

Serta memastikan pengelolaan limbah cat dan emisi udara sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo. "Operasional bisnis berjalan silakan, tetapi jangan sampai merugikan ruang hidup warga sekitar," tegas Abud. Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat menambahkan, meski bengkel karoseri tersebut telah mengantongi izin usaha sejak tahun 2023, hal itu bukan berarti pengusaha

bisa mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitarnya. "Secara administrasi usaha tersebut memang telah mengantongi perizinan. Namun, keberadaan izin saja tidak cukup apabila pengusaha mengabaikan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha," tandas anggota dewan dari PDI Perjuangan (PDI-P) ini. Kata Choirul, salah satu persoalan yang muncul adalah minimnya komunikasi antara pemilik usaha dengan warga sejak awal operasional. Meski izin usaha sudah lengkap sejak tahun 2023, namun pemilik usaha tidak sosialisasi ke warga. "Mengantongi izin saja saya rasa kurang cukup, harus memperdunkan warga sekitar," tandasnya. Dalam mediasi itu, warga meminta pengusaha melakukan langkah nyata untuk mengurangi dampak polusi. Permintaan tersebut disambut dengan komitmen membangun fasilitas yang lebih memadai. "Alhamdulillah pengusaha juga siap, tidak hanya membangun gedung, tapi untuk pengencatan ada gedung tersendiri," bebernya. Ia berharap persoalan itu dapat diselesaikan secara bijak tanpa merugikan salah satu pihak. "Pengusaha

maupun warga, harus menurunkan ego masing-masing. Keberadaan UMKM atau industri lokal ini tetap harus kita dukung penuh. Tetapi, seluruh ketentuan dan regulasi juga wajib dipatuhi," harap Choirul. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo Ridho Prasetyo membenarkan bahwa usaha karoseri tersebut telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak 2023. "Tahun 2023 sudah terbit NIB," ujarnya. Meski demikian, Ridho menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan apabila pihak pengusaha mengingkari hasil mediasi. Pencabutan izin menjadi opsi yang dapat ditempuh apabila dalam dua bulan ke depan tidak ada upaya nyata untuk mengurangi dampak polusi yang dikeluhkan warga. Sebelumnya pada Selasa (7/7), sejumlah warga Desa Seketi Balongbendo mengadu ke DPRD Sidoarjo. Mereka ditemui Ketua Komisi A Rizza Ali Faizin dan Ketua Komisi C Choirul Hidayat. Dalam hearing dengan wakil rakyat itu, warga mengeluhkan kebisingan dan bau cat dari bengkel karoseri yang beroperasi di desa tersebut. (sta/ADV)

MUI Temukan 20 Titik Penjual Miras Terselubung, Pemkab Siapkan Penindakan

KOTA-Dugaan keberadaan sedikitnya 20 titik penjual minuman keras (miras) yang beroperasi secara terselubung di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Sejumlah tempat usaha bahkan diduga menyalahgunakan izin usaha, seperti menggunakan izin perdagangan beras untuk aktivitas penjualan miras.

Temuan tersebut disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo dalam pertemuan bersama Pemkab Sidoarjo. Menindaklanjuti laporan itu, pemerintah memastikan akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan, Pemkab berkomitmen menindaklanjuti hasil pembahasan bersama MUI dan instansi terkait. Saat ini, beberapa izin operasional tempat usaha yang diduga melanggar aturan telah diproses



untuk dicabut dan tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

"Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti hasil pembahasan bersama MUI dan instansi terkait. Beberapa izin operasional sudah diproses untuk ditutup, tinggal melengkapi administrasi," ujar Mimik, Selasa (21/7).

Ia menjelaskan, Satpol PP Sidoarjo saat ini juga tengah merampungkan

• Ke Halaman 10

Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti hasil pembahasan bersama MUI dan instansi terkait. Beberapa izin operasional sudah diproses untuk ditutup, tinggal melengkapi administrasi."

Mimik Idayana, Wakil Bupati Sidoarjo



CARI SOLUSI: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menggelar pertemuan dengan MUI Kabupaten Sidoarjo untuk membahas dugaan peredaran minuman keras (miras) secara terselubung.



MUI Temukan...

hasil pemeriksaan dan penindakan sebagai bahan rapat lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya.

Menurut perempuan yang akrab disapa Mak Mimik tersebut, pemerintah akan berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat sebelum melakukan penindakan secara serentak setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

"Seluruh proses akan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar setiap tindakan

memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuan kita mengembalikan wajah Sidoarjo sebagai Kota Santri yang aman, tertib, dan bersih dari kemudharatan. Semua langkah harus tegas, tetapi tetap sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tegasnya.

Mimik juga mengajak masyarakat mendukung upaya pemerintah bersama MUI dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta nilai-nilai moral di Kabupaten Sidoarjo.

Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa, Perundang-undangan, dan Hukum

MUI Kabupaten Sidoarjo Abdul Wahid Harun mengatakan, MUI telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah daerah dan meminta seluruh perizinan yang berkaitan dengan penjualan miras ditinjau kembali.

"Semua pihak sepakat untuk menelaah kembali seluruh regulasi dan perizinan secara cermat. Kita tidak ingin bertindak gegabah, tetapi setiap langkah harus sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar pria yang akrab disapa Gus Wahid.

Ia mengapresiasi respons cepat

Pemkab Sidoarjo yang dinilai siap menindaklanjuti berbagai masukan dari MUI. Menurutnya, penanganan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai unsur agar tetap menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

Gus Wahid menegaskan, MUI menolak segala bentuk peredaran miras maupun praktik kemaksiatan yang terorganisasi. Sikap tersebut sejalan dengan identitas Sidoarjo sebagai Kota Santri yang memiliki ratusan pondok pesantren dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai

agama serta kesusilaan.

"Kami berharap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi Sidoarjo semakin kondusif dan bersih dari berbagai bentuk penyimpangan," katanya.

Dalam penelusurannya, MUI menemukan sekitar 20 lokasi yang diduga menjual miras secara terselubung. Selain itu, terdapat dugaan penyalahgunaan izin usaha, di mana sejumlah tempat menggunakan izin perdagangan beras untuk menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. (dik/vga)



MUI Desak Pemkab Tutup 20 Toko Miras

**Karena Buka
Dekat Sekolah
dan Tempat Ibadah**

SIDOARJO - Maraknya peredaran minuman beralkohol yang melanggar aturan menjadi perhatian serius Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo. Organisasi ulama tersebut meminta pemkab mengambil langkah konkret untuk menertibkan toko minuman keras (miras) yang beroperasi di dekat sekolah dan tempat ibadah.

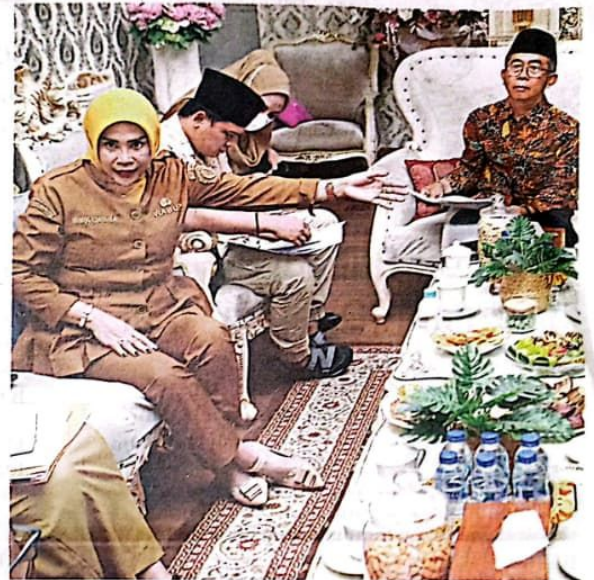
Mengacu Perda Nomor 10 Tahun 2013 pasal 17, masyarakat dilarang menjual miras di dekat fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah. Kenyataannya, ada tempat usaha yang melanggar aturan. MUI me-

nemu ada 20 toko miras yang beroperasi di dekat sekolah dan tempat ibadah.

Ketua Komisi Fatwa MUI Sidoarjo KH Abdul Wahid mengatakan, 20 toko miras tersebar di sejumlah wilayah. Empat di antaranya berada di kawasan Kahuripan. Sedangkan lainnya tersebar di Jalan KH Mukmin, Sekardangan, dan Sarirogo.

"Kami meminta seluruh toko ditutup karena mere-sahkan dan tidak sejalan dengan identitas Sidoarjo sebagai kota santri," kata Wahid kemarin (21/7). Dia menyebut, Sidoarjo memiliki sedikitnya 129 pondok pesantren. Banyaknya pondok pesantren itulah yang menjadi alasan MUI mendesak pemkab segera menertibkan peredaran miras.

KOORDINASI:
Wakil Bupati
Sidoarjo Mimik
Idayana menerima
kunjungan MUI
Sidoarjo di
Pendopo Delta
Wibawa untuk
membahas
peredaran miras
kemarin (21/7).



ANGGER BONDANU/JAWA POS

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan, pemkab akan menindaklanjuti masukan. Prosesnya dilakukan secara bertahap. Menurut Mimik, pemkab tidak akan mentoleransi pelaku usaha yang menjalankan aktivitas di luar izin yang dimiliki.

Tak Sesuai Izin

Salah satu toko miras yang sebelumnya disorot berada di kawasan Sarirogo. Ma-

sarakat protes karena tempat usaha berada di dekat sekolah. Sementara, pemkab juga menemukan adanya ketidaksesuaian izin.

Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo Happy Setyaningtyas Astrawati mengatakan, instansinya akan mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin usaha ke DPMTSP. Akan tetapi aktivitas penjualan miras akan dive-

rifikasi terlebih dahulu secara langsung oleh Satpol PP. Hal itu agar tidak terjadi kekeliruan dalam penindakan.

Hasil pengecekan awal menunjukkan jika izin yang tercatat di OSS berkaitan dengan kegiatan perdagangan besar. Tempat usaha menyalahi aturan karena menjual secara eceran. "Satpol PP akan segera turun untuk memeriksa perizinan," kata Happy. (ful/hen)



Sejak ditangkap polisi sudah tidak dinas. Hari ini (kemarin, Red) kami menerima salinan putusan dan akan melaporkannya ke BKD untuk tindak lanjut."

M. Aziz Muslim
Camat Sidoarjo

57 Murid PAUD hingga SMP Hidup dengan HIV

SIDOARJO - Sebanyak 522 anak dan remaja usia sekolah di Sidoarjo tercatat sebagai orang dengan HIV



Jawa Pos

WABUP SIDOARJO GARCEP TINJAU SD NEGERI KUPANG 3 DAN SD NEGERI KUPANG 4 DI DAERAH TERPENCIL

Pastikan Perbaiki Sekolah dan Percepat Program MBG

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.A.P., garcep meninjau langsung kondisi SD Negeri Kupang 3 dan SD Negeri Kupang 4 di Kecamatan Jabon, Senin (20/7/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi sarana pendidikan di wilayah pesisir dan terpencil sekaligus mempercepat penanganan kerusakan bangunan sekolah dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di SDN Kupang 3 yang berjumlah siswa tujuh puluh orang, Mimik menemukan sejumlah ruang kelas yang rusak. Kondisi bangunan dinilai masih belum layak karena atap bocor, dinding retak dan dinding pembatas antar kelas berlubang serta beberapa bagian memerlukan rehabilitasi menyeluruh.

"Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kalau memang harus direhabilitasi total, segera direncanakan agar anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman," tegasnya.

Peninjauan dilanjutkan ke SDN Kupang 4. Sekolah yang berdiri sejak 1987 itu masih menggunakan beberapa ruang kelas yang kondisinya memprihatinkan. Menurut Mimik, empat ruang kelas menjadi prioritas rehabilitasi dengan menggunakan material yang sesuai karakteristik wilayah pesisir agar lebih tahan terhadap korosi akibat kadar garam yang tinggi.

"Walaupun siswanya hanya dua belas orang, mereka tetap memiliki hak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Sekolah di daerah terpencil seperti ini harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.



Mimik juga mengapresiasi dedikasi para guru yang tetap mengajar meski harus menempuh perjalanan jauh dan menghadapi berbagai keterbatasan.

"Terima kasih atas pengabdian bapak dan ibu guru. Meskipun muridnya sedikit, tetap semangat mendidik mereka karena setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang terbaik," katanya.

Selain itu, Mimik memastikan Program MBG segera menjangkau SDN Kupang 3, SDN Kupang 4, dan TK di kawasan tersebut. Selama ini para siswa belum menerima manfaat program karena pembangunan dapur pelayanan belum selesai dan lokasi distribusi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih cukup jauh.

"Sudah kami koordinasikan. Insya Allah akhir bulan ini MBG mulai disalurkan sehingga anak-anak di wilayah ini dapat segera merasakan

manfaatnya," ungkapnya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Netty Lastiningsih, memastikan hasil peninjauan di SDN Kupang 3 dan SDN Kupang 4 akan segera ditindaklanjuti melalui kajian teknis. Menurutnya, rehabilitasi bangunan akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah pesisir agar lebih tahan terhadap kadar garam yang tinggi.

"Perbaikan akan menggunakan material yang sesuai dengan kondisi lingkungan pesisir sehingga bangunan lebih awet dan pemanfaatan anggaran menjadi lebih efektif. Kami juga memastikan Tunjangan Bantuan Pendidikan (TB) tahap I dan II bagi siswa yang memenuhi syarat dapat segera direalisasikan tahun ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni

Chudlori mendorong peningkatan kesejahteraan guru di daerah terpencil melalui usulan tambahan insentif dan tunjangan transportasi pada APBD 2027.

"Guru di wilayah terpencil masih menanggung sendiri biaya transportasi. Karena itu kami mengusulkan adanya tunjangan khusus yang didukung regulasi daerah. Selain itu, wilayah Kupang Kecamatan Jabon juga harus menjadi prioritas Program Makan Bergizi Gratis serta mendapat perhatian dalam perbaikan akses jalan menuju sekolah," tegas Dhamroni.

Sebagai bentuk kepedulian, Mimik turut menyerahkan bantuan kepada para guru dan siswa serta menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil. (Khol/Dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Gedangan Juara Umum MTQ ke-32, Sekda: Sidoarjo Gudangnya Qari dan Hafiz

KOTA-Kecamatan Gedangan keluar sebagai juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-32 Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026. Prestasi tersebut semakin menegaskan Sidoarjo sebagai daerah yang kaya akan qari, qariah, hafiz, dan hafizah berprestasi.

Pengumuman juara disampaikan pada malam penutupan MTQ ke-32 di Pendapa Delta Wibawa, Senin (20/7). Sekretaris

Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti ajang tersebut.

"Alhamdulillah, Kabupaten Sidoarjo merupakan gudangnya qari dan qariah. Melalui MTQ ini kita berharap terus lahir qari, qariah, hafiz, dan hafizah yang mampu mengharumkan nama Sidoarjo di tingkat Provinsi Jawa Timur hingga nasional," ujarnya.

● Ke Halaman 10



BANGGA: Sekretaris Daerah Sidoarjo, Fenny Apridawati mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).



Gedangan Juara Umum...

Fenny berharap MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an sekaligus mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia dan berprestasi.

Ia juga memberikan motivasi kepada peserta yang belum berhasil meraih juara agar terus meningkatkan kemampuan.

"Yang belum menjadi juara jangan

patah semangat. Teruslah berlatih dan belajar karena kesempatan berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional masih terbuka lebar. MTQ bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan untuk meningkatkan kualitas generasi Qurani," tuturnya.

Pada MTQ tahun ini, Kecamatan Gedangan meraih juara umum dengan mengumpulkan 166 poin. Posisi kedua ditempati Kecamatan Candi dengan 118 poin, disusul Kecamatan Waru di peringkat ketiga dengan 110 poin.

Sementara itu, Kecamatan Sidoarjo mengoleksi 96 poin, Wonoayu 90 poin, Sedati 67 poin, Jabon 61 poin, Tulangan 47 poin, Tanggulangin 40 poin, Krian 37 poin, Porong 34 poin, Taman 28 poin, Balongbendo 25 poin, Sukodono 21 poin, Krembung 20 poin, Prambon 19 poin, Tarik 16 poin, dan Buduran 5 poin.

Penghargaan defile terbaik diraih Kecamatan Sedati. Sebagai bentuk apresiasi kepada para pemenang, Bupati Sidoarjo Subandi menyiapkan dua

tiket umrah yang akan diundi khusus bagi seluruh peraih juara pertama di setiap cabang musabaqah. Selain itu, uang pembinaan bagi para pemenang akan disalurkan secara nontunai.

MTQ ke-32 Kabupaten Sidoarjo diikuti lebih dari 520 peserta yang berkompetisi pada 40 cabang musabaqah. Sebanyak 150 peserta berhasil meraih gelar juara dan diharapkan menjadi wakil terbaik Kabupaten Sidoarjo pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur hingga tingkat nasional. (dik/vga)



50 Pasang Calon Pengantin di Sidoarjo Dapat Bimbingan Sebelum Nikah

Sidoarjo, Bhirawa

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Selasa (21/7) kemarin, mengumpulkan 50 pasang calon pengantin (Catin) atau 100 orang, untuk diberikan bimbingan kesehatan perempuan dewasa.

Fungsional penyuluh kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Mochamad Soffa SGz, mengatakan kegiatan tersebut arahnya untuk mencegah angka kematian ibu dan anak, mencegah penyakit menular, dan mencegah anak yang dilahirkan tumbuh kondisi stunting. "Juga mencegah angka perceraian di Sidoarjo," kata Soffa, dalam acara yang digelar di aula Kemenag Sidoarjo itu.

Informasi dari pengadilan agama (PA) Sidoarjo, yang ia dapat, angka perceraian di kabupaten Sidoarjo berkisar 40 sampai 45 persen.

Dalam acara setengah hari ini, sejumlah materi ikut diberikan. Ada dari RSUD Notopuro Sidoarjo soal kesehatan reproduksi, psikolog dari layanan disabilitas Dikbud Sidoarjo soal merawat kesehatan mental dan masalah spiritual dari Kemenag Sidoarjo.

Acara yang digelar seiring dengan rencana akan dilakukan penanda tanganan MOU, antara Pemkab Sidoarjo dengan Kemenag Sidoarjo, terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pelayanan kesehatan dan pendampingan calon pengantin.

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, MOU seperti ini, kata Soffa, sudah berjalan. Sehingga akan ditindak lanjuti di tingkat kabupaten. OPD yang terkait, dalam program ini, akan punya peranan sendiri-sendiri. Misalnya Dinas Kesehatan akan melakukan cek kesehatan bagi para calon pengantin.

Dinas P3AKB, lewat pendamping keluarga melakukan pendampingan kepada para Catin, mulai dari rencana pernikahan, cek kesehatan, dan akad nikah oleh KUA. Dan, Pihak KUA, memberikan bimbingan pernikahan. "Tujuan utama, adalah menciptakan keluarga sehat, jasmani

rohani, kepada ibu, bapak dan anak," kata Soffa.

Disampaikan Widya, salah satu peserta workshop ini materi yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat bagi dirinya yang akan melangsungkan pernikahan pada Bulan September 2026 ini. "Sangat menambah referensi saya, pada masalah kesehatan mental misalnya, saya jadi punya ilmu cara mengontrol emosi pada saat pernikahan nanti," kata gadis asal Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran itu. [kus.ca]



alkus/bhirawa

Sepasang calon pengantin yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para calon pengantin di Kabupaten Sidoarjo.

Kepedulian Anggota Satgas TMMD, Aksi Nyata Anggota Satgas, Pikulan Rumput Diangkat

Bojonegoro, Bhirawa

Kepedulian anggota Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Kodim 0813/Bojonegoro kembali terlihat di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.

Di sela-sela pelaksanaan program TMMD ke-129 di Desa Kesongo, personel Satgas turut membantu warga dengan ikut memikul rumput hasil mencari pakan ternak, Selasa (21/7/2026).

Tanpa canggung, anggota TNI memanggul ikatan rumput bersama warga dari lahan menuju rumah. Aksi sederhana tersebut menjadi bukti bahwa kehadiran Satgas TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan sasaran fisik,

tetapi juga hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Komandan Satgas SSK TMMD ke-129, Lettu Ckm Purnomo, mengatakan bahwa membantu warga merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada rakyat. "Kebersamaan seperti inilah yang ingin kami bangun melalui TMMD. Tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat. Ketika melihat warga membutuhkan bantuan, anggota Satgas akan selalu siap turun tangan karena TNI lahir dari rakyat dan selalu hadir untuk rakyat," ujar Lettu Ckm Poernomo.

Salah seorang warga mengaku senang atas kepedulian anggota Satgas yang tidak sungkan ikut memikul rumput untuk pakan ternaknya. "Kami sangat terbantu. Kehadiran bapak-bapak TNI membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Semoga TMMD membawa manfaat besar bagi Desa Kesongo," tuturnya.

Melalui aksi sederhana tersebut, semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat terus terjalin selama pelaksanaan TMMD ke-129 di Desa Kesongo. Selain mempercepat pembangunan desa, kehadiran Satgas juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. [bas.ca]



Di sela-sela pelaksanaan program TMMD ke-129 di Desa Kesongo, personel Satgas turut membantu warga dengan ikut memikul rumput hasil mencari pakan ternak.

... dan ikut membantu warga dengan ikut memikul rumput hasil mencari pakan ternak.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Tindaklanjuti Aduan Bansos, Fakta di Hearing Berujung Gelak Tawa



Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Niat Ahmad Alatas mencari keadilan soal bantuan sosial (bansos) justru berujung fakta tak terduga. Warga Perumahan Bumi Citra Fajar (BCF), Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo itu mengadu ke Komisi D DPRD Sidoarjo karena merasa tak pernah menerima bansos. Namun saat hearing digelar, terungkap bantuan sembako untuk keluarganya ternyata sudah dicairkan oleh sang istri.

Kasus itu mengemuka dalam hearing Komisi D DPRD Sidoarjo yang digelar di ruang rapat DPRD, Selasa (21/7). Rapat dipimpin Ketua Komisi D bersama anggota Komisi D Dhamroni dan Zuhlul Yusar, serta dihadiri Camat Sidoarjo, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, dan aparat Kelurahan Bulu Sidokare. Di hadapan anggota dewan, Ahmad Alatas mengaku selama ini tidak pernah menikmati bantuan pemerintah, baik Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun bantuan kesehatan. Menurutnya, bisa saja masih banyak warga yang mengalami hal serupa tetapi memilih diam.

"Saya beranikan diri lapor, karena bisa jadi di luar sana banyak yang bernasib sama seperti saya," ujar Alatas.

Menanggapi pengaduan tersebut, Komisi D langsung meminta Dinas Sosial membuka data penerima bantuan milik keluarga Ahmad Alatas. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Wildan, menjelaskan seluruh penyaluran bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat. Ia memaparkan, di Kelurahan Bulu Sidokare terdapat 173 keluarga penerima PKH, 330 kepala keluarga penerima bantuan sembako, serta 911 warga yang memperoleh bantuan iuran jaminan kesehatan. Sementara 1.916 warga lainnya belum masuk sebagai penerima bantuan sosial. Keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat membuat kami belum bisa memberikan bantuan kepada seluruh warga yang membutuhkan. Kami juga menggunakan data yang ditetapkan pemerintah pusat," kata Wildan. Suasana hearing berubah ketika data penerima bantuan keluarga Ahmad Alatas ditampilkan. Dari data Dinas Sosial diketahui bantuan sembako atas nama keluarganya telah dicairkan oleh Kusma Dewi, yang merupakan istrinya. Riwayat pencairan tercatat berlangsung pada periode Oktober-Desember 2024 dan kembali diterima untuk Januari-Maret 2025. Perwakilan Dinas Sosial menjelaskan, dalam program bantuan sembako, penerima manfaat memang kerap didaftarkan atas nama istri sebagai pengelola kebutuhan rumah tangga agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya. Fakta itu sontak memancing gelak tawa peserta hearing. Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni, pun melontarkan celetukan.

"Lho sudah diambil istrinya, masa tidak diberi tahu kalau dapat bantuan?" ujarnya sambil tersenyum. Meski demikian, Dhamroni menegaskan hearing tersebut menjadi momentum mengevaluasi akurasi data penerima bansos di Kabupaten Sidoarjo. "Kami menerima pengaduan masyarakat dan langsung menindaklanjutinya. Fungsi DPRD adalah memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak ada warga yang berhak justru terlewat," tegasnya. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Zuhlul Yusar, meminta Dinas Sosial bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan melakukan verifikasi ulang terhadap warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar. "Data harus terus diperbarui. Kalau memang ada warga yang memenuhi syarat tetapi belum masuk, tentu akan kami perjuangkan melalui mekanisme yang berlaku agar tidak menyalahi aturan," kata Zuhlul. Komisi D memastikan akan mengawal proses pembaruan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bansos di Kabupaten Sidoarjo semakin tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

